

Box

FH.  
IX.57

# LITIGASI

JURNAL ILMU HUKUM

**Audit Mutu Hukum dan Mitigasi Terhadap Badan Usaha Milik Petani Sebagai Wujud Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Menghadapi ASEAN - CHINA FREE TRADE AREA**

**Pentingnya Kerjasama Pengelolaan Wilayah Perbatasan (Kalimantan Barat) Antara Pemerintah Indonesia dengan Malaysia**

**Telaah Perbandingan Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Menurut Tiga Peraturan Perundang-undangan Hukum Tanah Nasional**

**Putusan Mahkamah Konstitusi dan Akibat Hukumnya Terhadap Kedudukan Anak Luar Kawin di Indonesia**

**Kerjasama Desa Dalam Kerangka Otonomi Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004**

**Basis dan Model Alternatif Penelitian Hukum Indonesia**

UNPAS

**AKREDITASI**  
No. 56/DIKTI/Kep/2012

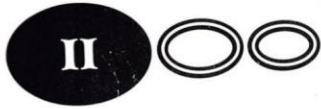
Jurnal Ilmu Hukum

Vol. 13 No. 2

Hlm. 1432 - 1661

Bandung  
Oktober 2012

ISSN  
0853 - 7100



## DAFTAR ISI

### HASIL PENELITIAN

---

Halaman 1432  
Audit Mutu Hukum dan Mitigasi Terhadap Badan Usaha Milik Petani Sebagai Wujud  
Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Menghadapi ASEAN – CHINA FREE TRADE AREA.  
T. Murwaji | Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.

Halaman 1461  
Pentingnya Kerjasama Pengelolaan Wilayah Perbatasan (Kalimantan Barat) Antara Pemerintah  
Indonesia dengan Malaysia.  
Jawahir Thontowi | Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### ARTIKEL

---

Halaman 1488  
Telaah Perbandingan Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Menurut Tiga Peraturan Perundang-undangan  
Hukum Tanah Nasional.  
Aslan Noor | Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh - Yusuf Tangerang.

Halaman 1515  
Putusan Mahkamah Konstitusi dan Akibat Hukumnya Terhadap Kedudukan Anak Luar Kawin di  
Indonesia.  
Purbandari | Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular Jakarta.

Halaman 1551  
Kerjasama Desa Dalam Kerangka Otonomi Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.  
Berna Sudjana Ermaya | Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

Halaman 1599  
Basis dan Model Alternatif Penelitian Hukum Indonesia.  
Anthon Freddy Susanto | Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.



## PENGANTAR REDAKSI

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT kami ucapkan atas tersusunnya Jurnal Ilmu Hukum LITIGASI Volume 13 No. 2 Edisi Oktober 2012. Setelah mendapatkan begitu banyak karya ilmiah dalam bidang hukum, kami melakukan proses penyeleksian tulisan-tulisan tersebut untuk dimuat dalam edisi kali ini. Komposisi tulisan pada edisi ini cukup beragam, yang meliputi hasil penelitian, artikel lepas, dan artikel ulasan. Untuk hasil penelitian ditulis oleh T. Muwardji dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung yang membedah persoalan mengenai Audit Mutu Hukum dan Mitigasi Terhadap Badan Usaha Milik Petani Sebagai Wujud Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Menghadapi ASEAN – CHINA FREE TRADE AREA. Hasil penelitian lainnya ditulis oleh Jawahir Thontowi dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul Pentingnya Kerjasama Pengelolaan Wilayah Perbatasan (Kalimantan Barat) Antara Pemerintah Indonesia dengan Malaysia.

Selain itu, pada edisi kali ini Jurnal Ilmu Hukum LITIGASI juga mengangkat kajian mengenai Telaah Perbandingan Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Menurut Tiga Peraturan Perundang-undangan Hukum Tanah Nasional yang ditulis oleh Aslan Noor dari Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh - Yusuf Tangerang, serta kajian mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi dan Akibat Hukumnya Terhadap



Kedudukan Anak Luar Kawin di Indonesia oleh Purbandari dari Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular Jakarta.

Kerjasama Desa Dalam Kerangka Otonomi Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 oleh Berna Sudjana Ermaya dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Sedangkan tulisan lainnya mengangkat isu seputar Basis dan Model Alternatif Penelitian Hukum Indonesia oleh Anthon F. Susanto dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

Semoga edisi kali ini dapat meningkatkan pencerahan dan motivasi penulis-penulis lainnya, termasuk pembaca kritis di kalangan akademisi maupun mahasiswa hukum di Fakultas Hukum secara luas. Tentunya, saran dan kritik tetap dibutuhkan sebagai upaya perbaikan bagi edisi-edisi selanjutnya.

Wassalam,

Bandung, 29 Oktober 2012

Redaksi

# TELAAH PERBANDINGAN TERHADAP HAK ATAS TANAH ULAYAT MENURUT TIGA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HUKUM TANAH NASIONAL

ASLAN NOOR

Fakultas Hukum Universitas Islam Sekh-Yusuf, Jalan Maulana Yusuf, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Telp. (021) 552706-5527063, Fax. (021) 5581068, Email: nooraslan@yahoo.com.

## ABSTRAK

Dalam mempertahankan eksistensi tanah ulayat, merupakan proteksi terhadap keberadaan dan kehidupan masyarakat adat yang dianggap belum mampu berkompetitif akibat derasnya laju pembangunan. Salah satu dampak derasnya laju pembangunan terhadap tanah ulayat adalah sebagaimana yang terjadi di Sumatera Barat. Untuk mempertahankan tanah ulayat agar tetap eksis disatu pihak, namun dipihak lain dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk mengentaskan kemiskinan, maka perlu mencari konsep yang tepat tentang hak sekunder yang akan diterapkan di atas tanah ulayat tersebut dan bersifat seimbang antara mempertahankan dan pemanfaatannya. Pemerintah Sumatera Barat melalui Perda No. 6 Tahun 2008 telah mengatur tentang pendaftaran subyek dan obyek hak tanah ulayat serta mengatur tentang kemungkinan menerapkan hak sekunder di atas hak ulayat. Namun substansi terhadap pengaturan tersebut, belum terlihat sinkron dengan perundang-undangan yang mengatur keberadaan hak atas tanah ulayat serta hukum adat Minangkabau. Untuk itu diusulkan agar Perda Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 diterjemahkan kedalam Kebijakan Kepala Badan Pertanahan Nasional, serta sebuah konsep yaitu menempatkan hak pakai di atas tanah ulayat.

Kata Kunci: Hak, Tanah Ulayat, Hukum Tanah.

## ABSTRACT

In order to defend the existence of communal land, it is another shape of protection for the life of indigeneous people that considered is ready to compete with modernization. One of the impact of rapid development is the impact on communal land in West Sumatra. To keep the existence of communal land in one hand, but the other hand needs economic growth to alleviate poverty, so that it is necessary to find the right concept of secondary rights that will be applied on the communal land with the purpose to balanced between maintaining and utilizing it. West Sumatera Government Regulation No. 6 year 2008 has set the subject and object of registration of communal land and set the possibility of applying secondary rights over land rights. But the substance still need to be worked out with the laws that govern the existence of communal land rights and Minangkabau customary law. So that it is proposed that West Sumatera Government Regulation No. 6 year 2008 translated into the Head of the National Land Policy, and a concept that is put on the right to use communal land.

Keywords: Rights, Communal Land, the Land Law.



# LITIGASI

JURNAL ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PASUNDAN**

Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung 40261

Telp. 022-4262226, 4217343

Fax. 022-4217340

Website: <http://www.hukum.unpas.ac.id>

e-mail: [litigasi.hukum@gmail.com](mailto:litigasi.hukum@gmail.com)

PERPUSTAKAAN FH-JNPAS



0000006514

PERPUS